



SALINAN

**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 3 TAHUN 2025

**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 322 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan peraturan daerah tentang APBD dan/atau peraturan daerah tentang perubahan APBD dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati menetapkan rancangan Perda Kabupaten dimaksud menjadi peraturan daerah.
 - b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat:.....

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Malinau Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Malinau Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 65);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN:.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
- (3) Ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah/Perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	3.046.319.713.621,19
b. Belanja	Rp	2.871.174.358.821,88
Surplus/(Defisit)	Rp	175.145.354.799,31
c. Pembiayaan:		
Penerimaan	Rp	539.432.175.932,66
Pengeluaran	Rp	0,00
Pembiayaan Netto	Rp	539.432.175.932,66
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	714.577.530.731,97

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diuraikan sebagai berikut :

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp67.728.768.210,19 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Anggaran Pendapatan Rp 2.978.590.945.411,00
Setelah Perubahan
 - 2) Realisasi Rp 3.046.319.713.621,19
Selisih Lebih/(Kurang) Rp 67.728.768.210,19
- b. selisih.....

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(646.848.762.521,78) dengan rincian sebagai berikut:

1)	Anggaran Belanja	Rp	3.518.023.121.343,66
	Setelah Perubahan		
2)	Realisasi	Rp	<u>2.871.174.358.821,88</u>
	Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	(646.848.762.521,78)

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp714.577.530.731,97 dengan rincian sebagai berikut :

1)	Surplus/(Defisit)	Rp	(539.432.175.932,66)
	Setelah Perubahan		
2)	Realisasi	Rp	<u>175.145.354.799,31</u>
	Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	714.577.530.731,97

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(0,00)dengan rincian sebagai berikut :

1)	Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Setelah Perubahan	Rp	539.432.175.932,66
2)	Realisasi		Rp	<u>539.432.175.932,66</u>
	Selisih Lebih/(Kurang)		Rp	(0,00)

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1)	Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	Setelah Perubahan	Rp	0,00
2)	Realisasi		Rp	<u>0,00</u>
	Selisih Lebih/(Kurang)		Rp	0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(0,00) dengan rincian sebagai berikut :

1)	Anggaran Pembiayaan Netto	Setelah Perubahan	Rp	539.432.175.932,66
2)	Realisasi		Rp	<u>539.432.175.932,66</u>
	Selisih Lebih/(Kurang)		Rp	(0,00)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

a. saldo.....

a. saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	539.432.175.932,66
b. penggunaan SAL tahun berjalan	Rp	539.432.175.932,66
c. SILPA	Rp	714.577.530.731,97
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp	-
saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	714.577.530.731,97

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	6.807.966.717.911,73
b. Jumlah Kewajiban	Rp	44.102.123.742,91
c. Jumlah Ekuitas	Rp	6.763.864.594.168,82

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan LO	Rp	2.409.502.352.854,60
b. Beban Daerah	Rp	2.230.979.342.545,07
c. Surplus/(Defisit) dari	Rp	178.523.010.309,53
d. Operasi	Rp	<u>679.974.690.784,13</u>
Surplus/(Defisit) dari		
e. Kegiatan Non Operasional	Rp	858.497.701.093,66
Surplus/(Defisit) sebelum		
Pos Luar Biasa		
f. Surplus/(Defisit) dari Pos	Rp	(4.485.577.411,00)
Luar Biasa		
g. Surplus/(Defisit) LO	Rp	854.012.123.682,66

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. saldo awal kas di BUD, bendahara		
Pengeluaran, JKN dan BLUD	Rp	539.543.569.444,66
per 1 Januari 2024		
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp	957.079.841.103,31
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(781.934.486.304,00)
d. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	(70.541.381,00)
e. saldo akhir kas di BUD, bendahara	Rp	714.618.382.862,97
Pengeluaran, JKN dan BLUD		
per 31 Desember 2024		

f. saldo.....

f.	Saldo akhir kas di bendahara penerimaan Per 31 Desember 2024	Rp	0,00
g.	Saldo akhir kas lainnya per 31 Desember 2024	Rp	0,00
h.	Saldo akhir kas per 31 Desember 2024	Rp	714.618.382.862,97

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

a.	Ekuitas awal	Rp	5.909.145.466.347,24
b.	Surplus/(Defisit) LO	Rp	854.012.123.682,66
c.	Koreksi Nilai Persediaan	Rp	(38.800.000,00)
d.	Lain-Lain	Rp	745.804.138,92
e.	Ekuitas akhir	Rp	6.763.864.594.168,82

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g—memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - 1) Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
 - 2) Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - 3) Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - 4) Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Lampiran III.....

- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- .
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - 1) Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - 2) Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12.....

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
Pada tanggal 20 Agustus 2025.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

Ttd

ERNES SILVANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025 NOMOR 3.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN
UTARA: (114/3/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Malinau Secretariat (Setkab. Malinau). The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU" around the top and "SETDA BAGIAN HUKUM" around the bottom. In the center is a smaller emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "Slamet Riyono" is printed and underlined.

Slamet Riyono

 PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2024					
KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH	2.978.590.945.411,00	3.046.319.713.621,19	67.728.768.210,19	102,27
4.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	42.410.212.371,00	42.652.724.279,52	242.511.908,52	100,57
4.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	42.369.712.371,00	42.622.029.903,52	252.317.532,52	100,60
1.02.2.14.0.00.03.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	42.369.712.371,00	42.622.029.903,52	252.317.532,52	100,60
4.1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	40.500.000,00	30.694.376,00	(9.805.624,00)	75,79
1.03.1.04.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	40.500.000,00	30.694.376,00	(9.805.624,00)	75,79
4.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	609.000.000,00	2.183.234.803,00	1.574.234.803,00	358,50
4.02.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	70.000.000,00	130.387.000,00	60.387.000,00	186,27
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	70.000.000,00	130.387.000,00	60.387.000,00	186,27
4.02.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	120.000.000,00	655.057.203,00	535.057.203,00	545,88
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	120.000.000,00	655.057.203,00	535.057.203,00	545,88
4.02.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	419.000.000,00	1.397.790.600,00	978.790.600,00	333,60
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	419.000.000,00	1.397.790.600,00	978.790.600,00	333,60
4.03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	903.731.000,00	657.104.100,00	(246.626.900,00)	72,71
4.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	903.731.000,00	657.104.100,00	(246.626.900,00)	72,71
3.31.3.30.2.17.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	903.731.000,00	657.104.100,00	(246.626.900,00)	72,71
4.05	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.934.668.002.040,00	3.000.826.650.438,67	66.158.648.398,67	102,25
4.05.02	KEUANGAN	2.934.668.002.040,00	3.000.826.650.438,67	66.158.648.398,67	102,25
5.02.0.00.0.00.05.0000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.934.668.002.040,00	3.000.826.650.438,67	66.158.648.398,67	102,25
5	BELANJA DAERAH	3.518.023.121.343,66	2.871.174.358.821,88	(646.848.762.521,78)	81,61

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
5.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.753.997.552.967,60	1.399.590.564.974,99	(354.406.987.992,61)	79,79
5.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	400.370.663.196,20	342.371.340.277,99	(57.999.322.918,21)	85,51
1.02.2.14.0.00.03.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	400.370.663.196,20	342.371.340.277,99	(57.999.322.918,21)	85,51
5.1	BELANJA OPERASI	279.340.771.864,20	246.765.356.992,99	(32.575.414.871,21)	88,34
5.1.01	Belanja Pegawai	175.447.704.801,20	157.317.954.014,00	(18.129.750.787,20)	89,67
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.743.067.063,00	88.297.402.978,99	(14.445.664.084,01)	85,94
5.1.05	Belanja Hibah	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	-	100,00
5.2	BELANJA MODAL	121.029.891.332,00	95.605.983.285,00	(25.423.908.047,00)	78,99
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.737.302.207,00	45.750.561.572,00	(3.986.740.635,00)	91,98
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61.886.189.125,00	40.638.421.713,00	(21.247.767.412,00)	65,67
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.160.000.000,00	8.117.000.000,00	(43.000.000,00)	99,47
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.246.400.000,00	1.100.000.000,00	(146.400.000,00)	88,25
5.01.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	41.844.417.869,20	37.551.977.733,00	(4.292.440.136,20)	89,74
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.731.470.902,00	14.028.384.144,00	(2.703.086.758,00)	83,84
5.1	BELANJA OPERASI	8.610.708.952,00	6.048.584.144,00	(2.562.124.808,00)	70,24
5.1.01	Belanja Pegawai	5.312.644.556,00	4.800.745.828,00	(511.898.728,00)	90,36
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.298.064.396,00	1.247.838.316,00	(2.050.226.080,00)	37,84
5.2	BELANJA MODAL	8.120.761.950,00	7.979.800.000,00	(140.961.950,00)	98,26
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.120.761.950,00	7.979.800.000,00	(140.961.950,00)	98,26
1.05.0.00.0.00.03.0000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	25.112.946.967,20	23.523.593.589,00	(1.589.353.378,20)	93,67
5.1	BELANJA OPERASI	24.830.346.967,20	23.247.793.589,00	(1.582.553.378,20)	93,63
5.1.01	Belanja Pegawai	18.021.636.052,20	16.862.849.118,00	(1.158.786.934,20)	93,57
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.808.710.915,00	6.384.944.471,00	(423.766.444,00)	93,78
5.2	BELANJA MODAL	282.600.000,00	275.800.000,00	(6.800.000,00)	97,59
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	282.600.000,00	275.800.000,00	(6.800.000,00)	97,59
5.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	762.645.948.073,20	561.701.951.692,00	(200.943.996.381,20)	73,65
1.03.1.04.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	762.645.948.073,20	561.701.951.692,00	(200.943.996.381,20)	73,65

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
5.1	BELANJA OPERASI	93.817.533.692,20	69.452.422.398,00	(24.365.111.294,20)	74,03
5.1.01	Belanja Pegawai	13.557.501.076,20	12.130.131.957,00	(1.427.369.119,20)	89,47
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.260.032.616,00	57.322.290.441,00	(22.937.742.175,00)	71,42
5.2	BELANJA MODAL	668.828.414.381,00	492.249.529.294,00	(176.578.885.087,00)	73,60
5.2.01	Belanja Modal Tanah	13.314.944.652,00	3.508.012.723,00	(9.806.931.929,00)	26,35
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.671.508.000,00	51.535.560.000,00	(5.135.948.000,00)	90,94
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	134.337.971.150,00	70.825.474.698,00	(63.512.496.452,00)	52,72
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	463.572.268.579,00	365.550.346.173,00	(98.021.922.406,00)	78,86
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	931.722.000,00	830.135.700,00	(101.586.300,00)	89,10
5.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	505.989.915.026,00	424.775.753.154,00	(81.214.161.872,00)	83,95
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	505.989.915.026,00	424.775.753.154,00	(81.214.161.872,00)	83,95
5.1	BELANJA OPERASI	444.432.354.023,00	370.558.589.859,00	(73.873.764.164,00)	83,38
5.1.01	Belanja Pegawai	315.093.949.680,00	266.060.033.623,00	(49.033.916.057,00)	84,44
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.543.357.213,00	92.630.996.716,00	(21.912.360.497,00)	80,87
5.1.05	Belanja Hibah	14.795.047.130,00	11.867.559.520,00	(2.927.487.610,00)	80,21
5.2	BELANJA MODAL	61.557.561.003,00	54.217.163.295,00	(7.340.397.708,00)	88,08
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.611.532.670,00	15.324.409.680,00	(287.122.990,00)	98,16
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.720.448.333,00	38.768.393.615,00	(6.952.054.718,00)	84,79
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	110.580.000,00	9.360.000,00	(101.220.000,00)	8,46
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	100,00
5.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	41.774.774.303,00	31.868.505.872,00	(9.906.268.431,00)	76,29
1.03.1.04.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	41.774.774.303,00	31.868.505.872,00	(9.906.268.431,00)	76,29
5.1	BELANJA OPERASI	38.762.586.000,00	29.129.244.289,00	(9.633.341.711,00)	75,15
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.762.586.000,00	29.129.244.289,00	(9.633.341.711,00)	75,15
5.2	BELANJA MODAL	3.012.188.303,00	2.739.261.583,00	(272.926.720,00)	90,94
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.012.188.303,00	2.739.261.583,00	(272.926.720,00)	90,94
5.01.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.371.834.500,00	1.321.036.246,00	(50.798.254,00)	96,30
2.08.1.06.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	1.371.834.500,00	1.321.036.246,00	(50.798.254,00)	96,30

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
5.1	BELANJA OPERASI	1.371.834.500,00	1.321.036.246,00	(50.798.254,00)	96,30
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.371.834.500,00	1.321.036.246,00	(50.798.254,00)	96,30
5.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	281.838.140.252,40	231.601.997.697,89	(50.236.142.554,51)	82,18
5.02.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.372.129.134,00	9.643.032.453,00	(729.096.681,00)	92,97
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.372.129.134,00	9.643.032.453,00	(729.096.681,00)	92,97
5.1	BELANJA OPERASI	9.248.139.134,00	8.521.532.453,00	(726.606.681,00)	92,14
5.1.01	Belanja Pegawai	6.687.565.234,00	6.077.105.138,00	(610.460.096,00)	90,87
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.560.573.900,00	2.444.427.315,00	(116.146.585,00)	95,46
5.2	BELANJA MODAL	1.123.990.000,00	1.121.500.000,00	(2.490.000,00)	99,78
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.123.990.000,00	1.121.500.000,00	(2.490.000,00)	99,78
5.02.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	612.551.640,00	444.478.825,00	(168.072.815,00)	72,56
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	612.551.640,00	444.478.825,00	(168.072.815,00)	72,56
5.1	BELANJA OPERASI	554.137.100,00	388.598.825,00	(165.538.275,00)	70,13
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	554.137.100,00	388.598.825,00	(165.538.275,00)	70,13
5.2	BELANJA MODAL	58.414.540,00	55.880.000,00	(2.534.540,00)	95,66
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.414.540,00	55.880.000,00	(2.534.540,00)	95,66
5.02.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	14.541.509.482,00	10.618.086.520,00	(3.923.422.962,00)	73,02
2.22.3.26.0.00.03.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	14.541.509.482,00	10.618.086.520,00	(3.923.422.962,00)	73,02
5.1	BELANJA OPERASI	14.541.509.482,00	10.618.086.520,00	(3.923.422.962,00)	73,02
5.1.01	Belanja Pegawai	9.291.247.462,00	5.581.931.958,00	(3.709.315.504,00)	60,08
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.250.262.020,00	5.036.154.562,00	(214.107.458,00)	95,92
5.1.05	Belanja Hibah	-		0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	-		0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-		0,00	0,00
5.02.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	74.540.177.773,00	63.281.713.770,89	(11.258.464.002,11)	84,90
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	74.540.177.773,00	63.281.713.770,89	(11.258.464.002,11)	84,90
5.1	BELANJA OPERASI	73.185.643.815,00	63.116.913.770,89	(10.068.730.044,11)	86,24
5.1.01	Belanja Pegawai	8.631.789.564,00	5.215.762.291,00	(3.416.027.273,00)	60,43

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.900.225.251,00	43.367.566.479,89	(6.532.658.771,11)	86,91
5.1.05	Belanja Hibah	14.653.629.000,00	14.533.585.000,00	(120.044.000,00)	99,18
5.2	BELANJA MODAL	1.354.533.958,00	164.800.000,00	(1.189.733.958,00)	12,17
5.2.01	Belanja Modal Tanah	838.257.958,00		(838.257.958,00)	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	181.276.000,00	164.800.000,00	(16.476.000,00)	90,91
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	335.000.000,00		(335.000.000,00)	0,00
5.02.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.812.180.356,20	11.725.009.144,00	(2.087.171.212,20)	84,89
2.16.0.00.0.00.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.812.180.356,20	11.725.009.144,00	(2.087.171.212,20)	84,89
5.1	BELANJA OPERASI	10.448.063.656,20	8.573.906.984,00	(1.874.156.672,20)	82,06
5.1.01	Belanja Pegawai	4.470.564.461,20	4.135.774.565,00	(334.789.896,20)	92,51
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.977.499.195,00	4.438.132.419,00	(1.539.366.776,00)	74,25
5.2	BELANJA MODAL	3.364.116.700,00	3.151.102.160,00	(213.014.540,00)	93,67
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.968.224.100,00	2.759.602.160,00	(208.621.940,00)	92,97
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	395.892.600,00	391.500.000,00	(4.392.600,00)	98,89
5.02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.227.362.000,00	3.785.201.370,00	(442.160.630,00)	89,54
3.31.3.30.2.17.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.227.362.000,00	3.785.201.370,00	(442.160.630,00)	89,54
5.1	BELANJA OPERASI	4.224.239.000,00	3.782.078.370,00	(442.160.630,00)	89,53
5.1.01	Belanja Pegawai	-		0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.224.239.000,00	3.782.078.370,00	(442.160.630,00)	89,53
5.2	BELANJA MODAL	3.123.000,00	3.123.000,00	0,00	100,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.123.000,00	3.123.000,00	0,00	100,00
5.02.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	59.805.944.142,00	44.142.012.500,00	(15.663.931.642,00)	73,81
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	59.805.944.142,00	44.142.012.500,00	(15.663.931.642,00)	73,81
5.1	BELANJA OPERASI	50.765.214.098,00	35.614.625.075,00	(15.150.589.023,00)	70,16
5.1.01	Belanja Pegawai	8.459.041.997,00	7.695.863.068,00	(763.178.929,00)	90,98
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.306.172.101,00	27.918.762.007,00	(14.387.410.094,00)	65,99
5.1.05	Belanja Hibah	-		0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	9.040.730.044,00	8.527.387.425,00	(513.342.619,00)	94,32

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.817.072.796,00	6.622.150.000,00	(194.922.796,00)	97,14
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.783.657.248,00	1.465.237.425,00	(318.419.823,00)	82,15
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-		0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	440.000.000,00	440.000.000,00	0,00	0,00
5.02.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	7.589.489.709,00	6.888.658.395,00	(700.831.314,00)	90,77
2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan	7.589.489.709,00	6.888.658.395,00	(700.831.314,00)	90,77
5.1	BELANJA OPERASI	7.589.489.709,00	6.888.658.395,00	(700.831.314,00)	90,77
5.1.01	Belanja Pegawai	5.953.227.830,00	5.328.253.920,00	(624.973.910,00)	89,50
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.636.261.879,00	1.560.404.475,00	(75.857.404,00)	95,36
5.02.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	26.064.419.637,00	24.037.219.199,00	(2.027.200.438,00)	92,22
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	26.064.419.637,00	24.037.219.199,00	(2.027.200.438,00)	92,22
5.1	BELANJA OPERASI	26.044.419.637,00	24.023.219.199,00	(2.021.200.438,00)	92,24
5.1.01	Belanja Pegawai	5.080.335.191,00	4.687.069.353,00	(393.265.838,00)	92,26
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.036.084.446,00	16.408.149.846,00	(1.627.934.600,00)	90,97
5.1.05	Belanja Hibah	2.928.000.000,00	2.928.000.000,00	0,00	100,00
5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	14.000.000,00	(6.000.000,00)	70,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	14.000.000,00	(6.000.000,00)	70,00
5.02.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9.403.500.478,00	8.659.904.131,00	(743.596.347,00)	92,09
2.08.1.06.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	9.403.500.478,00	8.659.904.131,00	(743.596.347,00)	92,09
5.1	BELANJA OPERASI	9.399.588.478,00	8.655.992.131,00	(743.596.347,00)	92,09
5.1.01	Belanja Pegawai	5.789.207.478,00	5.182.745.171,00	(606.462.307,00)	89,52
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.310.381.000,00	2.173.246.960,00	(137.134.040,00)	94,06
5.1.05	Belanja Hibah	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	100,00
5.2	BELANJA MODAL	3.912.000,00	3.912.000,00	0,00	100,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.912.000,00	3.912.000,00	0,00	100,00
5.02.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	8.157.911.096,00	7.512.897.370,00	(645.013.726,00)	92,09
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.157.911.096,00	7.512.897.370,00	(645.013.726,00)	92,09
5.1	BELANJA OPERASI	8.156.523.596,00	7.512.897.370,00	(643.626.226,00)	92,11

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
5.1.01	Belanja Pegawai	5.683.759.296,00	5.143.613.864,00	(540.145.432,00)	90,50
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.472.764.300,00	2.369.283.506,00	(103.480.794,00)	95,82
5.1.05	Belanja Hibah	-		0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	1.387.500,00		(1.387.500,00)	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.387.500,00		(1.387.500,00)	0,00
5.02.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.249.300.000,00	901.269.500,00	(348.030.500,00)	72,14
1.02.2.14.0.00.03.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.249.300.000,00	901.269.500,00	(348.030.500,00)	72,14
5.1	BELANJA OPERASI	1.249.300.000,00	901.269.500,00	(348.030.500,00)	72,14
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.249.300.000,00	901.269.500,00	(348.030.500,00)	72,14
5.02.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	27.292.597.043,00	23.324.279.735,00	(3.968.317.308,00)	85,46
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	27.292.597.043,00	23.324.279.735,00	(3.968.317.308,00)	85,46
5.1	BELANJA OPERASI	7.790.115.043,00	6.978.900.578,00	(811.214.465,00)	89,59
5.1.01	Belanja Pegawai	5.900.576.531,00	5.406.970.134,00	(493.606.397,00)	91,63
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.889.538.512,00	1.571.930.444,00	(317.608.068,00)	83,19
5.2	BELANJA MODAL	19.502.482.000,00	16.345.379.157,00	(3.157.102.843,00)	83,81
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	278.432.000,00	277.450.000,00	(982.000,00)	99,65
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.195.050.000,00	16.047.230.557,00	(3.147.819.443,00)	83,60
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	29.000.000,00	20.698.600,00	(8.301.400,00)	71,37
5.02.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	9.903.954.391,00	5.981.435.772,00	(3.922.518.619,00)	60,39
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.903.954.391,00	5.981.435.772,00	(3.922.518.619,00)	60,39
5.1	BELANJA OPERASI	9.180.969.852,00	5.281.085.305,00	(3.899.884.547,00)	57,52
5.1.01	Belanja Pegawai	8.028.341.682,00	4.203.143.741,00	(3.825.197.941,00)	52,35
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.152.628.170,00	1.077.941.564,00	(74.686.606,00)	93,52
5.2	BELANJA MODAL	722.984.539,00	700.350.467,00	(22.634.072,00)	96,87
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	276.900.000,00	256.251.000,00	(20.649.000,00)	92,54
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	371.084.539,00	369.099.467,00	(1.985.072,00)	99,47
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00
5.02.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	14.265.113.371,20	10.656.799.013,00	(3.608.314.358,20)	74,71

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
2.07.0.00.0.00.02.0000	Dinas Ketenagakerjaan	14.265.113.371,20	10.656.799.013,00	(3.608.314.358,20)	74,71
5.1	BELANJA OPERASI	14.233.113.371,20	10.656.799.013,00	(3.576.314.358,20)	74,87
5.1.01	Belanja Pegawai	4.030.744.886,20	3.790.516.536,00	(240.228.350,20)	94,04
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.202.368.485,00	6.866.282.477,00	(3.336.086.008,00)	67,30
5.2	BELANJA MODAL	32.000.000,00		(32.000.000,00)	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	32.000.000,00		(32.000.000,00)	0,00
5.03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	92.608.435.760,67	67.542.432.146,00	(25.066.003.614,67)	72,93
5.03.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	8.005.164.728,00	7.631.384.442,00	(373.780.286,00)	95,33
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	8.005.164.728,00	7.631.384.442,00	(373.780.286,00)	95,33
5.1	BELANJA OPERASI	7.839.943.128,00	7.467.432.592,00	(372.510.536,00)	95,25
5.1.01	Belanja Pegawai	4.706.225.578,00	4.377.163.382,00	(329.062.196,00)	93,01
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.133.717.550,00	3.090.269.210,00	(43.448.340,00)	98,61
5.2	BELANJA MODAL	165.221.600,00	163.951.850,00	(1.269.750,00)	99,23
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.010.000,00	40.000.000,00	(1.010.000,00)	97,54
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	124.211.600,00	123.951.850,00	(259.750,00)	99,79
5.03.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	9.734.410.175,00	9.300.606.333,00	(433.803.842,00)	95,54
2.22.3.26.0.00.03.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9.734.410.175,00	9.300.606.333,00	(433.803.842,00)	95,54
5.1	BELANJA OPERASI	5.263.222.975,00	4.855.409.893,00	(407.813.082,00)	92,25
5.1.01	Belanja Pegawai	1.550.000,00		(1.550.000,00)	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.261.672.975,00	4.855.409.893,00	(406.263.082,00)	92,28
5.2	BELANJA MODAL	4.471.187.200,00	4.445.196.440,00	(25.990.760,00)	99,42
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156.000.000,00	155.340.000,00	(660.000,00)	99,58
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.273.987.200,00	4.248.656.440,00	(25.330.760,00)	99,41
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	41.200.000,00	41.200.000,00	0,00	100,00
5.03.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	11.552.141.977,67	11.034.070.446,00	(518.071.531,67)	95,52
3.31.3.30.2.17.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.552.141.977,67	11.034.070.446,00	(518.071.531,67)	95,52
5.1	BELANJA OPERASI	10.197.080.650,00	9.693.247.426,00	(503.833.224,00)	95,06
5.1.01	Belanja Pegawai	7.160.945.070,00	6.707.866.599,00	(453.078.471,00)	93,67

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.036.135.580,00	2.985.380.827,00	(50.754.753,00)	98,33
5.2	BELANJA MODAL	1.355.061.327,67	1.340.823.020,00	(14.238.307,67)	98,95
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.070.000,00	140.770.000,00	(300.000,00)	99,79
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.089.783.807,67	1.075.846.000,00	(13.937.807,67)	98,72
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	124.207.520,00	124.207.020,00	(500,00)	100,00
5.03.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.513.307.050,00	3.079.730.492,00	(433.576.558,00)	87,66
3.31.3.30.2.17.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.513.307.050,00	3.079.730.492,00	(433.576.558,00)	87,66
5.1	BELANJA OPERASI	2.853.115.050,00	2.461.533.363,00	(391.581.687,00)	86,28
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.853.115.050,00	2.461.533.363,00	(391.581.687,00)	86,28
5.2	BELANJA MODAL	660.192.000,00	618.197.129,00	(41.994.871,00)	93,64
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	349.952.000,00	349.100.000,00	(852.000,00)	99,76
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	280.240.000,00	269.097.129,00	(11.142.871,00)	96,02
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.000.000,00		(30.000.000,00)	0,00
5.03.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	59.803.411.830,00	36.496.640.433,00	(23.306.771.397,00)	61,03
3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pertanian	59.803.411.830,00	36.496.640.433,00	(23.306.771.397,00)	61,03
5.1	BELANJA OPERASI	57.202.055.936,00	34.178.181.563,00	(23.023.874.373,00)	59,75
5.1.01	Belanja Pegawai	12.717.697.000,00	11.025.695.511,00	(1.692.001.489,00)	86,70
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.484.358.936,00	23.152.486.052,00	(21.331.872.884,00)	52,05
5.2	BELANJA MODAL	2.601.355.894,00	2.318.458.870,00	(282.897.024,00)	89,13
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	647.191.550,00	500.031.000,00	(147.160.550,00)	77,26
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.954.164.344,00	1.818.427.870,00	(135.736.474,00)	93,05
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-		0,00	0,00
5.04	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	619.275.624.640,91	541.182.100.078,00	(78.093.524.562,91)	87,39
5.04.01	SEKRETARIAT DAERAH	558.841.675.714,91	489.133.278.561,00	(69.708.397.153,91)	87,53
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	558.841.675.714,91	489.133.278.561,00	(69.708.397.153,91)	87,53
5.1	BELANJA OPERASI	461.030.263.437,91	404.597.162.702,00	(56.433.100.735,91)	87,76
5.1.01	Belanja Pegawai	31.631.726.625,00	28.670.157.045,00	(2.961.569.580,00)	90,64
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.030.182.569,00	255.775.388.499,00	(32.254.794.070,00)	88,80

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
5.1.04	Belanja Subsidi	59.121.101.840,00	50.556.674.945,00	(8.564.426.895,00)	85,51
5.1.05	Belanja Hibah	78.711.999.559,91	68.083.672.213,00	(10.628.327.346,91)	86,50
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.535.252.844,00	1.511.270.000,00	(2.023.982.844,00)	42,75
5.2	BELANJA MODAL	97.811.412.277,00	84.536.115.859,00	(13.275.296.418,00)	86,43
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-		0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.810.878.118,00	65.472.508.610,00	(9.338.369.508,00)	87,52
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.404.859.159,00	18.608.112.811,00	(3.796.746.348,00)	83,05
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	85.000.000,00	63.494.438,00	(21.505.562,00)	74,70
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	510.675.000,00	392.000.000,00	(118.675.000,00)	76,76
5.04.02	SEKRETARIAT DPRD	60.433.948.926,00	52.048.821.517,00	(8.385.127.409,00)	86,13
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	60.433.948.926,00	52.048.821.517,00	(8.385.127.409,00)	86,13
5.1	BELANJA OPERASI	60.153.948.926,00	51.775.821.517,00	(8.378.127.409,00)	86,07
5.1.01	Belanja Pegawai	16.907.886.326,00	14.014.596.531,00	(2.893.289.795,00)	82,89
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.246.062.600,00	37.761.224.986,00	(5.484.837.614,00)	87,32
5.2	BELANJA MODAL	280.000.000,00	273.000.000,00	(7.000.000,00)	97,50
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	280.000.000,00	273.000.000,00	(7.000.000,00)	97,50
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-		0,00	0,00
5.05	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	627.394.453.080,08	500.904.186.407,00	(126.490.266.673,08)	79,84
5.05.03	KEPEGAWAIAN	22.542.868.747,00	19.759.654.070,00	(2.783.214.677,00)	87,65
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	22.542.868.747,00	19.759.654.070,00	(2.783.214.677,00)	87,65
5.1	BELANJA OPERASI	20.817.462.797,00	19.535.647.120,00	(1.281.815.677,00)	93,84
5.1.01	Belanja Pegawai	6.599.875.437,00	6.208.480.574,00	(391.394.863,00)	94,07
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.217.587.360,00	13.327.166.546,00	(890.420.814,00)	93,74
5.2	BELANJA MODAL	1.725.405.950,00	224.006.950,00	(1.501.399.000,00)	12,98
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.405.950,00	124.328.950,00	(1.077.000,00)	99,14
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.600.000.000,00	99.678.000,00	(1.500.322.000,00)	6,23
5.05.02	KEUANGAN	569.283.948.078,68	450.930.537.963,00	(118.353.410.115,68)	79,21
5.02.0.00.0.00.05.0000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	569.283.948.078,68	450.930.537.963,00	(118.353.410.115,68)	79,21

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
5.1	BELANJA OPERASI	77.236.707.879,00	67.960.397.077,00	(9.276.310.802,00)	87,99
5.1.01	Belanja Pegawai	30.577.503.783,80	23.286.580.628,00	(7.290.923.155,80)	76,16
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.659.204.095,20	44.673.816.449,00	(1.985.387.646,20)	95,74
5.2	BELANJA MODAL	992.000.000,00	885.054.000,00	(106.946.000,00)	89,22
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	457.000.000,00	435.920.000,00	(21.080.000,00)	95,39
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.000.000,00		(5.000.000,00)	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	530.000.000,00	449.134.000,00	(80.866.000,00)	84,74
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	113.455.355.723,88	4.485.577.411,00	(108.969.778.312,88)	3,95
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	113.455.355.723,88	4.485.577.411,00	(108.969.778.312,88)	3,95
5.4	BELANJA TRANSFER	377.599.884.475,80	377.599.509.475,00	(375.000,80)	100,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.776.840.175,80	1.776.465.175,00	(375.000,80)	99,98
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	375.823.044.300,00	375.823.044.300,00	0,00	100,00
5.05.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	6.243.563.000,00	5.330.522.717,00	(913.040.283,00)	85,38
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	6.243.563.000,00	5.330.522.717,00	(913.040.283,00)	85,38
5.1	BELANJA OPERASI	6.243.563.000,00	5.330.522.717,00	(913.040.283,00)	85,38
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.243.563.000,00	5.330.522.717,00	(913.040.283,00)	85,38
5.05.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	788.622.000,00	692.004.549,00	(96.617.451,00)	87,75
5.01.5.05.0.00.02.0000	Bappeda dan Litbang	788.622.000,00	692.004.549,00	(96.617.451,00)	87,75
5.1	BELANJA OPERASI	476.854.000,00	391.953.149,00	(84.900.851,00)	82,20
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	476.854.000,00	391.953.149,00	(84.900.851,00)	82,20
5.2	BELANJA MODAL	311.768.000,00	300.051.400,00	(11.716.600,00)	96,24
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	311.768.000,00	300.051.400,00	(11.716.600,00)	96,24
5.05.06	PENGLOLAAN PERBATASAN	6.782.850.166,00	6.157.951.269,00	(624.898.897,00)	90,79
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	6.782.850.166,00	6.157.951.269,00	(624.898.897,00)	90,79
5.1	BELANJA OPERASI	6.758.850.166,00	6.133.951.269,00	(624.898.897,00)	90,75
5.1.01	Belanja Pegawai	4.281.717.656,00	3.881.881.838,00	(399.835.818,00)	90,66
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.477.132.510,00	2.252.069.431,00	(225.063.079,00)	90,91
5.2	BELANJA MODAL	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
5.05.01	PERENCANAAN	21.752.601.088,40	18.033.515.839,00	(3.719.085.249,40)	82,90
5.01.5.05.0.00.02.0000	Bappeda dan Litbang	21.752.601.088,40	18.033.515.839,00	(3.719.085.249,40)	82,90
5.1	BELANJA OPERASI	21.752.601.088,40	18.033.515.839,00	(3.719.085.249,40)	82,90
5.1.01	Belanja Pegawai	11.587.080.456,40	10.942.242.842,00	(644.837.614,40)	94,43
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.165.520.632,00	7.091.272.997,00	(3.074.247.635,00)	69,76
5.06	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	29.866.587.741,00	23.711.527.950,00	(6.155.059.791,00)	79,39
5.06.01	INSPEKTORAT DAERAH	29.866.587.741,00	23.711.527.950,00	(6.155.059.791,00)	79,39
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	29.866.587.741,00	23.711.527.950,00	(6.155.059.791,00)	79,39
5.1	BELANJA OPERASI	26.371.072.741,00	20.368.130.830,00	(6.002.941.911,00)	77,24
5.1.01	Belanja Pegawai	14.175.994.541,00	13.258.564.596,00	(917.429.945,00)	93,53
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.195.078.200,00	7.109.566.234,00	(5.085.511.966,00)	58,30
5.2	BELANJA MODAL	3.495.515.000,00	3.343.397.120,00	(152.117.880,00)	95,65
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-		0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.345.515.000,00	3.283.479.320,00	(62.035.680,00)	98,15
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	150.000.000,00	59.917.800,00	(90.082.200,00)	39,95
5.07	UNSUR KEWILAYAHAN	65.828.450.432,00	60.149.393.654,00	(5.679.056.778,00)	91,37
5.07.01	KECAMATAN	65.828.450.432,00	60.149.393.654,00	(5.679.056.778,00)	91,37
7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Bahau Hulu	3.756.903.225,40	3.547.585.089,00	(209.318.136,40)	94,43
5.1	BELANJA OPERASI	3.675.903.225,40	3.469.085.089,00	(206.818.136,40)	94,37
5.1.01	Belanja Pegawai	2.836.606.783,40	2.639.102.647,00	(197.504.136,40)	93,04
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	839.296.442,00	829.982.442,00	(9.314.000,00)	98,89
5.2	BELANJA MODAL	81.000.000,00	78.500.000,00	(2.500.000,00)	96,91
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.000.000,00	78.500.000,00	(2.500.000,00)	96,91
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Kayan Hilir	3.845.683.392,00	3.697.570.241,00	(148.113.151,00)	96,15
5.1	BELANJA OPERASI	3.845.683.392,00	3.697.570.241,00	(148.113.151,00)	96,15
5.1.01	Belanja Pegawai	2.868.528.892,00	2.726.521.341,00	(142.007.551,00)	95,05
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	977.154.500,00	971.048.900,00	(6.105.600,00)	99,38

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan kayan Hulu	5.028.603.741,00	4.343.418.197,00	(685.185.544,00)	86,37
5.1	BELANJA OPERASI	5.028.603.741,00	4.343.418.197,00	(685.185.544,00)	86,37
5.1.01	Belanja Pegawai	4.028.839.691,00	3.346.566.493,00	(682.273.198,00)	83,07
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	999.764.050,00	996.851.704,00	(2.912.346,00)	99,71
7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Kayan Selatan	4.045.697.855,00	3.809.830.397,00	(235.867.458,00)	94,17
5.1	BELANJA OPERASI	4.045.697.855,00	3.809.830.397,00	(235.867.458,00)	94,17
5.1.01	Belanja Pegawai	3.045.698.688,00	2.818.405.397,00	(227.293.291,00)	92,54
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	999.999.167,00	991.425.000,00	(8.574.167,00)	99,14
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Malinau Barat	4.850.348.525,00	4.311.887.294,00	(538.461.231,00)	88,90
5.1	BELANJA OPERASI	4.847.848.525,00	4.309.387.294,00	(538.461.231,00)	88,89
5.1.01	Belanja Pegawai	3.959.284.170,00	3.434.586.307,00	(524.697.863,00)	86,75
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	888.564.355,00	874.800.987,00	(13.763.368,00)	98,45
5.2	BELANJA MODAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Malinau Kota	6.567.255.057,00	6.060.161.457,00	(507.093.600,00)	92,28
5.1	BELANJA OPERASI	6.492.255.057,00	5.985.911.457,00	(506.343.600,00)	92,20
5.1.01	Belanja Pegawai	5.567.543.157,00	5.095.663.747,00	(471.879.410,00)	91,52
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	924.711.900,00	890.247.710,00	(34.464.190,00)	96,27
5.2	BELANJA MODAL	75.000.000,00	74.250.000,00	(750.000,00)	99,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.000.000,00	74.250.000,00	(750.000,00)	99,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Malinau Selatan	4.152.544.938,00	3.604.534.138,00	(548.010.800,00)	86,80
5.1	BELANJA OPERASI	4.152.544.938,00	3.604.534.138,00	(548.010.800,00)	86,80
5.1.01	Belanja Pegawai	3.152.556.288,00	2.622.219.688,00	(530.336.600,00)	83,18
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	999.988.650,00	982.314.450,00	(17.674.200,00)	98,23
7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	3.566.648.547,00	3.277.763.440,00	(288.885.107,00)	91,90
5.1	BELANJA OPERASI	3.558.648.547,00	3.269.863.440,00	(288.785.107,00)	91,88
5.1.01	Belanja Pegawai	2.566.682.547,00	2.323.595.440,00	(243.087.107,00)	90,53
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	991.966.000,00	946.268.000,00	(45.698.000,00)	95,39

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
5.2	BELANJA MODAL	8.000.000,00	7.900.000,00	(100.000,00)	98,75
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	7.900.000,00	(100.000,00)	98,75
7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Malinau Selatan Hulu	3.466.690.905,80	3.188.435.334,00	(278.255.571,80)	91,97
5.1	BELANJA OPERASI	3.466.690.905,80	3.188.435.334,00	(278.255.571,80)	91,97
5.1.01	Belanja Pegawai	2.466.691.905,80	2.216.713.134,00	(249.978.771,80)	89,87
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	999.999.000,00	971.722.200,00	(28.276.800,00)	97,17
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Malinau Utara	5.484.573.540,00	4.742.584.167,00	(741.989.373,00)	86,47
5.1	BELANJA OPERASI	5.484.573.540,00	4.742.584.167,00	(741.989.373,00)	86,47
5.1.01	Belanja Pegawai	4.469.345.240,00	3.794.868.234,00	(674.477.006,00)	84,91
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.015.228.300,00	947.715.933,00	(67.512.367,00)	93,35
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Mentarang	4.738.986.014,00	4.339.033.372,00	(399.952.642,00)	91,56
5.1	BELANJA OPERASI	4.718.986.014,00	4.320.033.372,00	(398.952.642,00)	91,55
5.1.01	Belanja Pegawai	3.768.687.064,00	3.378.310.125,00	(390.376.939,00)	89,64
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	950.298.950,00	941.723.247,00	(8.575.703,00)	99,10
5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.000.000,00	(1.000.000,00)	95,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	19.000.000,00	(1.000.000,00)	95,00
Kecamatan Mentarang Hulu	Kecamatan Mentarang Hulu	3.358.296.478,00	3.088.618.242,00	(269.678.236,00)	91,97
5.1	BELANJA OPERASI	3.358.296.478,00	3.088.618.242,00	(269.678.236,00)	91,97
5.1.01	Belanja Pegawai	2.358.296.478,00	2.126.623.242,00	(231.673.236,00)	90,18
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	961.995.000,00	(38.005.000,00)	96,20
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pujungan	4.328.182.078,00	4.022.743.828,00	(305.438.250,00)	92,94
5.1	BELANJA OPERASI	4.228.182.078,00	3.922.976.828,00	(305.205.250,00)	92,78
5.1.01	Belanja Pegawai	3.228.182.079,00	2.923.838.328,00	(304.343.751,00)	90,57
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	999.999.999,00	999.138.500,00	(861.499,00)	99,91
5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.767.000,00	(233.000,00)	99,77
5.2.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.767.000,00	(233.000,00)	99,77
7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Sungai Boh	5.323.695.542,20	5.006.486.074,00	(317.209.468,20)	94,04
5.1	BELANJA OPERASI	5.294.495.542,20	4.978.036.074,00	(316.459.468,20)	94,02

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
5.1.01	Belanja Pegawai	4.386.695.542,20	4.074.869.074,00	(311.826.468,20)	92,89
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	907.800.000,00	903.167.000,00	(4.633.000,00)	99,49
5.2	BELANJA MODAL	29.200.000,00	28.450.000,00	(750.000,00)	97,43
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.200.000,00	28.450.000,00	(750.000,00)	97,43
7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Sungai Tubu	3.314.340.593,60	3.108.742.384,00	(205.598.209,60)	93,80
5.1	BELANJA OPERASI	3.314.340.593,60	3.108.742.384,00	(205.598.209,60)	93,80
5.1.01	Belanja Pegawai	2.314.348.743,60	2.126.229.724,00	(188.119.019,60)	91,87
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	999.991.850,00	982.512.660,00	(17.479.190,00)	98,25
5.08	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	47.213.876.469,00	46.492.155.914,00	(721.720.555,00)	98,47
5.08.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	47.213.876.469,00	46.492.155.914,00	(721.720.555,00)	98,47
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	47.213.876.469,00	46.492.155.914,00	(721.720.555,00)	98,47
5.1	BELANJA OPERASI	47.213.876.469,00	46.492.155.914,00	(721.720.555,00)	98,47
5.1.01	Belanja Pegawai	5.658.769.042,00	5.132.827.108,00	(525.941.934,00)	90,71
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.389.475.243,00	3.240.368.453,00	(149.106.790,00)	95,60
5.1.05	Belanja Hibah	38.165.632.184,00	38.118.960.353,00	(46.671.831,00)	99,88
6	PEMBIAYAAN DAERAH	539.432.175.932,66	539.432.175.932,66	0,00	100,00
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	539.432.175.932,66	539.432.175.932,66	0,00	100,00
	KEUANGAN	539.432.175.932,66	539.432.175.932,66	0,00	100,00
5.02.0.00.0.00.05.0000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	539.432.175.932,66	539.432.175.932,66	0,00	100,00
6.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	539.432.175.932,66	539.432.175.932,66	0,00	100,00
6.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	539.432.175.932,66	539.432.175.932,66	0,00	100,00

Malinau, 20 Agustus 2025
BUPATI

Ttd

WEMPI W MAWA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono

Lampiran I.2
Nomor
Tanggal

: Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD
Kabupaten Malinau
: 3
: 20 Agustus 2025

 PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024					
KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		%	REALISASI 2023
		ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		
4	PENDAPATAN DAERAH	2.978.590.945.411,00	3.046.319.713.621,19	102,27	2.467.024.592.599,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	67.388.114.129,00	141.715.107.854,19	210,30	91.436.376.465,00
4.1.01	Pajak Daerah	15.135.396.658,00	22.683.699.225,45	149,87	17.025.552.333,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.633.005.100,00	3.303.729.829,00	125,47	1.690.555.129,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.620.000.000,00	4.058.750.422,70	112,12	3.939.962.456,51
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	45.999.712.371,00	111.668.928.377,04	242,76	68.780.306.546,49
4.1	PENDAPATAN TRANSFER	2.904.702.831.282,00	2.899.068.466.327,00	99,81	2.369.914.168.868,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.843.300.647.000,00	2.821.461.529.454,00	99,23	2.289.585.357.064,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	61.402.184.282,00	77.606.936.873,00	126,39	80.328.811.804,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.500.000.000,00	5.536.139.440,00	85,17	5.674.047.266,00
4.3.01	Pendapatan Hibah				500.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.500.000.000,00	5.536.139.440,00	85,17	5.174.047.266,00
5	BELANJA DAERAH	3.518.023.121.343,66	2.871.174.358.821,88	81,61	2.129.635.806.426,30
5.1	BELANJA OPERASI	2.014.699.970.645,31	1.707.151.680.631,88	84,73	1.347.706.553.259,30
5.1.01	Belanja Pegawai	802.464.796.562,20	692.774.633.854,00	86,33	517.179.663.601,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	997.874.511.525,20	824.327.324.746,88	82,61	681.989.682.230,30
5.1.04	Belanja Subsidi	59.121.101.840,00	50.556.674.945,00	85,51	32.069.056.558,00
5.1.05	Belanja Hibah	151.704.307.873,91	137.981.777.086,00	90,95	98.892.608.589,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.535.252.844,00	1.511.270.000,00	42,75	17.575.542.281,00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		%	REALISASI 2023
		ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		
5.2	BELANJA MODAL	1.012.267.910.498,67	781.937.591.304,00	77,25	479.773.888.175,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	14.153.202.610,00	3.508.012.723,00	24,79	2.926.630.777,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	222.470.159.381,00	202.880.877.292,00	91,19	185.827.769.121,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	296.749.623.208,67	196.973.026.308,00	66,38	152.303.142.023,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	472.561.780.299,00	374.432.398.081,00	79,23	134.691.487.204,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	390.580.000,00	282.360.000,00	72,29	104.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.942.565.000,00	3.860.916.900,00	64,97	3.920.859.050,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	113.455.355.723,88	4.485.577.411,00	3,95	3.513.349.290,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	113.455.355.723,88	4.485.577.411,00	3,95	3.513.349.290,00
5.4	BELANJA TRANSFER	377.599.884.475,80	377.599.509.475,00	100,00	298.642.015.702,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.776.840.175,80	1.776.465.175,00	99,98	1.481.234.162,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	375.823.044.300,00	375.823.044.300,00	100,00	297.160.781.540,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	- 539.432.175.932,66	175.145.354.799,31	-32,47	337.388.786.172,70
6	PEMBIAYAAN DAERAH	539.432.175.932,66	539.432.175.932,66	100,00	202.043.389.759,96
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	539.432.175.932,66	539.432.175.932,66	100,00	212.043.389.759,96
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	539.432.175.932,66	539.432.175.932,66	100,00	212.043.389.759,96
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				10.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah				10.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	539.432.175.932,66	539.432.175.932,66	0,00	202.043.389.759,96
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	714.577.530.731,97		539.432.175.932,66

Malinau, 20 Agustus 2025
BUPATI

Ttd

WEMPI W MAWA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono